

# ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

**Nurul Rifqah**

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang  
([nurulrifqah323@gmail.com](mailto:nurulrifqah323@gmail.com))

**Abstract :** *This research aims to identify and analyze the effect of (1) the labor force to imbalance regional development of West Sumatra (2) quality of human resource to imbalance regional development of West Sumatra (3) allocation of Public Funds to imbalance regional development of West Sumatra (4) government expenditure to imbalance regional development of West Sumatra. Using panel data analysis, the results of this research showed that the labor force and government expenditure has not significant effect to imbalance regional development of district/city in West Sumatra, the quality of human resource and allocation of Public Funds has significant effect to imbalance regional development of district/city in West Sumatra, and simultaneously there are significant effect between the labor force, quality of human resource, Allocation of public fund, and Government expenditure has significant effect to imbalance regional development of district/city in West Sumatra in research period.*

**Keywords:** *imbalance regional development, labor force, quality of human resource, allocation of Public Funds, and Government expenditure.*

**Abstrak :** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh (1) Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat (2) Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat (3) Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat (4) Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat. Dengan menggunakan analisis data panel hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Kualitas Sumberdaya Manusia dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dan secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara Angkatan Kerja, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Sumatera Barat pada periode penelitian.*

**Kata kunci :** *Ketimpangan Pembangunan Wilayah, Angkatan Kerja, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Pengeluaran Pemerintah*

Pembangunan dalam lingkup Negara secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi dan

tenaga kerja yang terampil, serta ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah (Kuncoro,2004).

Pembangunan ekonomi yang tidak seimbang biasanya terjadi karena pembangunan daerah hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Perkembangan ekonomi daerah yang diserahkan pada mekanisme pasar cenderung memperbesar ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Sebab dalam kenyataan, kegiatan dan perkembangan ekonomi lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Sebaliknya, pada wilayah lain yang nampak terjadi hanyalah semakin ketinggalan.

Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang sedang melakukan pembangunan diberbagai sektor di dalam perekonomiannya, pada tahun 2013 sebanyak 67 persen kabupaten di Sumatera Barat masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun 2013.

Ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat dapat dilihat berdasarkan suatu indikator atau suatu indeks ketimpangan pembangunan salah satunya adalah Indeks Entropi Theil.

Keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dan diukur dari pembangunan di bidang ekonomi saja tetapi juga perlu melibatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melihat indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus memperoleh tempat yang istimewa dalam program pembangunan, karena tidak ada suatu wilayah yang mampu berkembang dan tumbuh secara berkelanjutan hanya dengan mengandalkan Sumberdaya Alam (SDA) yang dimilikinya. Perbaikan ketimpangan bisa dicapai dengan melakukan investasi pada pembangunan manusia, baik dalam peningkatan akses dan kualitas di bidang pendidikan maupun peningkatan akses, kualitas dan layanan di bidang kesehatan.

Kualitas sumberdaya manusia masyarakat yang baik tentu akan menjadi modal dasar bagi keberhasilan pembangunan dan sebaliknya jika kualitas sumberdaya manusia rendah akan menjadi beban pemerintah dan menghambat pembangunan.

Dana alokasi umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Sumatera Barat. Disamping pemberian bantuan dana dari pemerintah pusat, daerah juga harus mengeluarkan anggaran untuk belanja publik.

Proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah sedang berkembang memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi, disebabkan oleh proses pembangunan baru dimulai di daerah sedang berkembang. Kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi

pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi juga faktor sosial-budaya sehingga akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan. sehingga penelitian bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh angkatan kerja terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Sumatera Barat (2) Pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Sumatera Barat (3) Pengaruh dana alokasi umum terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Sumatera Barat (4) Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Sumatera Barat (5) Pengaruh angkatan kerja, kualitas sumberdaya manusia, dana alokasi umum, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Sumatera Barat

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Ketimpangan Pembangunan

Secara teoritis permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan neo-klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antar tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai *hipotesa neo-klasik* yang menarik perhatian para ekonom dan perencana pembangunan daerah ( Sjafrizal , 2008 ).

Menurut hipotesa neo-klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur – angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara – negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (*reserve u-shape curve*).

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, Ying menggunakan indeks Entropi Theil. Indeks Entropi Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional. Dengan menggunakan alat analisis indeks Entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi. Rumus indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2002):

$$I(y) = \int \left( \frac{y^i}{Y} \right) \times \log \left( \frac{\frac{y^i}{Y}}{\frac{x_i}{X}} \right)$$

Dimana  $I(y)$  adalah indeks Entropi Theil,  $Y_i$  adalah PDRB perkapita kota/kabupaten,  $Y$  adalah rata-rata PDRB per kapita Sumatera Barat,  $X_i$  adalah jumlah penduduk Kota/ Kabupaten,  $X$  adalah jumlah penduduk Sumatera Barat

Indeks Entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan Entropi Theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam subunit geografis yang lebih kecil, pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedang yang kedua juga penting mengkaji tentang ketimpangan spasial (Kuncoro, 2002).

### **Teori Angkatan Kerja**

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan faktor positif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak angkatan kerja yang bekerja, semakin besar tingkat produksi yang dihasilkan dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penyebab ketimpangan suatu wilayah salah satunya adalah kondisi demografis antar wilayah yang berbeda. Kondisi tersebut meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat kesehatan dan pendidikan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat.

Kondisi demografis tersebut berpengaruh terhadap besarnya produktifitas dari suatu daerah. Daerah dengan kemampuan demografis yang baik akan berdampak pada produktifitas yang tinggi. Tingkat orang yang bekerja berpengaruh terhadap produktifitas suatu daerah, semakin tinggi tingkat orang yang bekerja di suatu daerah akan berdampak pada tingginya produktifitas daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan daerah dengan tingkat jumlah orang yang bekerja lebih sedikit. Perbedaan tingkat jumlah angkatan kerja yang bekerja antar daerah akan menyebabkan angka ketimpangan pembangunan semakin tinggi (Arsyad, 2010).

Teori neoklasik yang menyatakan bahwa, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan suatu wilayah, dengan adanya peningkatan dalam jumlah tenaga kerja maka akan berakibat kepada meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, dan aliran teori ini mempercayai adanya mobilitas faktor yang sempurna. Tenaga kerja akan berpindah dari daerah yang kurang maju ke daerah yang maju, dimana daerah maju memiliki upah yang relatif lebih tinggi dan memiliki lapangan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang kurang maju. Kondisi demikian akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah antara daerah yang kurang maju dan daerah maju menjadi meningkat karena para tenaga kerja yang produktif memilih bekerja di daerah maju daripada bekerja di daerah kurang maju. Selain faktor upah yang relatif lebih tinggi pada wilayah tersebut terdapat jumlah lapangan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lain sehingga ketimpangan antar wilayah semakin melebar.

Kondisi inilah yang menimbulkan ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah akan semakin melebar, karena para pekerja akan memilih untuk mencari pekerjaan di wilayah yang memiliki jumlah lapangan kerja yang banyak

dan upah yang tinggi dibandingkan dengan daerah dengan lapangan pekerjaan upah yang sedikit.

### **Teori Kualitas Sumberdaya Manusia**

Becker 1964 dalam teori *human capital* bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Sejalan dengan penelitian Gaiha 1993 yang mengatakan bahwa pendidikan pada diri seseorang dapat meningkatkan kemampuan dalam memperoleh dan menggunakan informasi dan memperoleh pemahaman akan perekonomian. Pendidikan secara tidak langsung berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan pribadi seseorang dengan cara meningkatkan produktifitas sehingga tercapainya standar hidup yang lebih baik. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang tinggi karena pendidikan yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, sehingga adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan itu sendiri.

Menurut Arzu (2007) untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan perkapita, serta menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebaiknya menjadi prioritas dalam program pembangunan suatu negara maupun daerah. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi akan berdampak positif terhadap distribusi pendapatan, sehingga berdampak kepada tingkat ketimpangan pembangunan yang semakin rendah

Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama dalam pembangunan modal SDM. Peningkatan modal SDM akan meningkatkan produktifitas, kemampuan beradaptasi dan menggunakan teknologi dalam produksi sehingga secara mikro akan mendorong produktifitas individu dan secara makro pertumbuhan ekonomi pembangunan ekonomi suatu daerah. Peningkatan pembangunan manusia akan membutuhkan modal yang besar dan diikuti dengan pemerataan pembangunan antar daerah.

### **Teori Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber keuangan untuk melakukan pembangunan daerah. Pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan diperlukan sumber dana. Untuk mencapai keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Bantuan pembangunan yang ditargetkan secara seksama dapat memberikan hasil yang lebih efektif. Bantuan Pembangunan yang diperluas, terutama upaya-upaya yang difokuskan pada kebutuhan dan kesempatan untuk mengurangi kemiskinan secara besar-besaran (Todaro, 2006).

Menurut G. Myrdal, dalam (Jhingan, 2003), “mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan situasipsikologis, idiologis, sosial, dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi merupakan tugas terpenting pemerintah”. Karena itu ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh. Menurut Prof. Lewis lingkup itu mencakup “ penyelenggaraan

pelayanan umum, menentukan sikap, membentuk lembaga - lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber menentukan distribusipendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalaikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh dan menentukan laju investasi.”Penyediaan *overhead social* dan ekonomi di Negara terbelakang sebagianbesar termasuk dalam kegiatan pemerintah. Kebutuhan bagi pelayanan dasar sepertijalan kereta api, transportasi darat, telekomunikasi, gas, listrik, alat-alat irigasi dan sebagainya penting sekali bagi pembangunan masa depan. Pembangunannya memerlukan investasi besar yang melampaui kemampuan perusahaan swasta di Negara seperti itu.

Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan cara menambah alokasi dana kepada masing-masing daerah dalam bentuk *block grant* berupa dana alokasi umum yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.(Kuncoro,2004).

### **Teori Pengeluaran Pemerintah**

Salah satu dari tujuan Desentralisasi adalah mengoreksi *horizontal imbalance*, yaitu memperkecil disparitas antar daerah dengan mekanisme *block grant/transfer* dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki. Dengan diberlakukannya desentralisasi maka daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan pengeluaran pemerintah daerah yang ada dalam APBD. Sesuai dengan peran pemerintah dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran stabilisasi, peran alokasi, peran distribusi, dan peran dinamisasi, maka pengeluaran pemerintah daerah harus dilandaskan pada peran-peran tersebut.

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah dan sebagai stimulus bagi pertumbuhan suatu daerah. Teori kebijakan fiskal berpendapat, peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak dibuat untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menurunkan angka pengangguran. Program pengeluaran pemerintah digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Menurut Smith dan Todaro, (2011) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk kepentingan publik. Hasil dari penelitian Gantara (2015) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini disebabkan sebagian dana belanja daerah dialokasikan untuk pengeluaran belanja modal yang digunakan

untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur khususnya di daerah kurang maju.

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ketimpangan pembangunan daerah sebagai variabel terikat (Y) dan yang menjadi variabel bebas (X) adalah angkatan kerja, kualitas sumberdaya manusia, dana alokasi umum, dan pengeluaran pemerintah.

Dengan menggunakan model regresi panel pada 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dari tahun 2006-2015 maka model yang digunakan dapat ditulis dalam bentuk :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + U_{it}$$

Dimana: Y adalah Tingkat Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah,  $X_1$  adalah Angkatan Kerja,  $X_2$  adalah Kualitas Sumberdaya Manusia,  $X_3$  adalah Dana Alokasi Umum,  $X_4$  adalah Pengeluaran Pemerintah, I adalah *Cross Section*, t adalah *Time Series*, U adalah *Error Term*

Dari hasil uji chow model terbaik yang di dapatkan adalah *fixed effect model* dan dari uji haustman didapatkan model yang terbaik untuk digunakan adalah *fixed effect model*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Angkatan kerja ( $X_1$ ) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah (Y) di Sumatera Barat selama periode 2006-2015 dengan koefisien regresinya sebesar  $-5.72E-06$ . Hal ini berarti apabila angkatan kerja meningkat satu satuan, maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat  $-5.7206$ . Hal ini berarti semakin meningkat jumlah angkatan kerja, maka akan terjadi penurunan ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat dengan asumsi *ceteris paribus*.

Kualitas sumberdaya manusia ( $X_2$ ) berpengaruh negative terhadap ketimpangan pembangunan wilayah (Y) di Sumatera Barat selama periode 2006-2015 dengan koefisien  $-0.044189$ . Hal ini berarti apabila kualitas sumberdaya manusia meningkat satu satuan, maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat sebesar  $-0.044189$ . Hal ini berarti semakin meningkat indeks pembangunan manusia, maka akan terjadi penurunan ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat dengan asumsi *ceteris paribus*.

Dana alokasi umum ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah (Y) di Sumatera Barat selama periode 2006-2015 dengan koefisien  $0.304890$ . Hal ini berarti semakin meningkat Dana Alokasi Umum, maka akan terjadi peningkatan ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat dan apabila terjadi penurunan maka ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat juga menurun dengan asumsi *ceteris paribus*.

**Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Fixed Effect Model**

Table 1. Hasil Model Regresi Panel

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/30/17 Time: 20:44

Sample: 2006 2015

Included observations: 10

Cross-sections included: 19

Total pool (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.195944	2.881630	-1.456101	0.1472
X1?	-5.72E-06	4.40E-06	-1.298568	0.1959
X2?	-0.044189	0.015188	-2.909425	0.0041
LOG(X3?)	0.304890	0.130522	2.335930	0.0207
LOG(X4?)	0.047447	0.119706	0.396363	0.6923
Fixed Effects (Cross)				
_KEPMENTAWAI--C	-0.052123			
_PESISIRSELATAN--C	-0.811961			
_KABSOLOK--C	-0.416179			
_SIJUNJUNG--C	-0.516683			
_TANAHDATAR--C	-0.168331			
_PADANGPARIAMAN--C	-0.312482			
_AGAM--C	-0.190627			
_LIMAPULUHKOTA--C	-0.085504			
_PASAMAN--C	-0.595507			
_SOLOKSELATAN--C	-1.043543			
_DHARMASRAYA--C	-0.554708			
_PASAMANBARAT--C	-0.278695			
_PADANG--C	1.455898			
_SOLOK--C	0.556138			
_SAWAHLUNTO--C	0.755087			
_PADANGPANJANG--C	0.967223			
_BUKITTINGGI--C	0.654814			
_PAYAKUMBUH--C	-0.007641			
_PARIAMAN--C	0.644824			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.714713	Mean dependent var	1.383263
Adjusted R-squared	0.677131	S.D. dependent var	0.754929
S.E. of regression	0.428963	Akaike info criterion	1.258183
Sum squared resid	30.72954	Schwarz criterion	1.651244
Log likelihood	-96.52736	Hannan-Quinn criter.	1.417406
F-statistic	19.01709	Durbin-Watson stat	2.008817
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Olahan E-Views 8*



Pengeluaran pemerintah (X4) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah (Y) di Sumatera Barat selama periode 2006-2015 dengan koefisien regresinya sebesar 0.047447. Hal ini berarti semakin meningkat pengeluaran pemerintah, maka akan terjadi peningkatan ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat dan apabila terjadi penurunan maka ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat juga menurun dengan asumsi *ceteris paribus*.

Dari tabel 1 diperoleh nilai konstanta sebesar  $-4.195944$  yang berarti tanpa dipengaruhi Angkatan Kerja (X1), Kualitas Sumberdaya Manusia (X2), Dana Alokasi Umum (X3) dan Pengeluaran Pemerintah (X4) maka Ketimpangan Pembangunan antar wilayah di Sumatera Barat (Y) turun sebesar  $4.195944$ .

Dapat dilihat konstanta dari kabupaten/kota seperti Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Payakumbuh mempunyai nilai konstanta yang negatif artinya bahwa nilai konstanta pada masing-masing kabupaten/kota berada di bawah ketimpangan pembangunan antar wilayah dan tanpa dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini dan nilai konstanta positif kabupaten kota seperti Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Pariaman di atas nilai konstanta ketimpangan pembangunan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah**

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa angkatan kerja (X1) mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat (Y). Tanda negatif dari hasil menunjukkan bahwa hasil konsisten dengan teori, namun dalam penelitian ini tidak signifikan. Hal ini diindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Sumatera Barat tidak ditentukan oleh angkatan kerja yang ada di Sumatera Barat karena walaupun angkatan kerja yang ada pada wilayah di Sumatera Barat mengalami kenaikan tidak menjamin bahwa ketimpangan pembangunan akan menurun.

Hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini ternyata ditolak. Menurut Arsyad (2010) Penyebab ketimpangan suatu wilayah salah satunya adalah kondisi demografis antar wilayah yang berbeda. Kondisi tersebut meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat kesehatan dan pendidikan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi demografis tersebut berpengaruh terhadap besarnya produktifitas dari suatu daerah. Daerah dengan kemampuan demografis yang baik akan berdampak pada produktifitas yang tinggi.

Tingkat orang yang bekerja berpengaruh terhadap produktifitas suatu daerah, semakin tinggi tingkat orang yang bekerja di suatu daerah akan berdampak pada tingginya produktifitas daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan daerah dengan tingkat jumlah orang yang bekerja lebih sedikit.

### **Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan ditemukan bahwa Kualitas Sumberdaya Manusia (X2) mempunyai pengaruh signifikan yang negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah Sumatera Barat (Y). Terdapat pengaruh signifikan antara IPM terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah di Sumatera Barat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang ada. Artinya, perubahan yang terjadi pada kualitas sumberdaya manusia akan mengakibatkan berubahnya ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat. Hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini ternyata diterima, dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara I kualitas sumberdaya manusia terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat.

Menurut teori *human capital* manusia bukan sekedar sumberdaya namun modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Tujuan dari pembangunan manusia adalah guna memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia yang tidak mungkin tercapai tanpa adanya kebebasan memilih dan bagaimana cara mereka akan menjalani hidup.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah**

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan bahwa dana alokasi umum (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan yang positif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat (Y). Terdapat pengaruh signifikan yang positif antara DAU terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat ditentukan oleh DAU yang ada. Artinya, perubahan yang terjadi pada DAU akan mengakibatkan berubahnya ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat. Karena berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa semakin tinggi DAU justru mengakibatkan ketimpangan pembangunan juga semakin meningkat. Hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini ternyata diterima, dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara DAU terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah Sumatera Barat.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Soekarno (2011) bahwa DAU memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan demikian halnya pendapatan perkapita. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perlu pengawasan dan penetapan standar penggunaan dana alokasi umum agar tepat pada tujuan dari desentralisasi yaitu memperkecil kesenjangan fiskal daerah yang pada akhirnya memperkecil ketimpangan pendapatan.

### **Pengaruh Pengeluaran pemerintah terhadap Pembangunan Antar wilayah di Sumatera Barat**

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah (X4) mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat (Y). Hal ini diindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Sumatera Barat tidak ditentukan oleh pengeluaran pemerintah yang ada di Sumatera Barat karena walaupun pengeluaran pemerintah yang ada pada wilayah di Sumatera Barat mengalami kenaikan tidak menjamin bahwa ketimpangan pembangunan akan menurun. Hipotesis alternative yang diajukan dalam penelitian ini ternyata ditolak.

Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Smith dan Todaro, (2011) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk kepentingan publik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini disebabkan sebagian dana belanja daerah dialokasikan untuk pengeluaran belanja modal yang digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur khususnya di daerah kurang maju

### **Pengaruh Angkatan Kerja, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dana Alokasi Umum, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara Angkatan Kerja, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Sumatera Barat. Kontribusi secara bersama-sama Angkatan Kerja, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dana Alokasi Umum, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Sumatera Barat sebesar 71.47 persen. Ini berarti 71.47 persen ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat dipengaruhi oleh Angkatan Kerja, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dana Alokasi Umum, Dan Pengeluaran Pemerintah. Sedangkan sisanya 28.53 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang dimasukkan ke dalam model atau dalam penelitian ini

### **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut : (1) Angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah, (2) Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah, (3) Dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang signifikan yang positif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat, (4) Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat, (5) Angkatan Kerja, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Pengeluaran Pemerintah secara

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di propinsi Sumatera Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rozany Nurmanah. 1999. *Kesenjangan Pengeluaran Pembangunan antar Wilayah dan Propinsi di Indonesia*. Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Volume XLVII, Nomor 4.
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik .*Sumatera Barat Dalam Angka*. 1995-2014. Bps Sumatera Barat: Sumatera Barat
- Bakri, Dkk. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Dan Kebijakan Penanggulangannya*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- BPS, BAPPENAS, dan UNDP (2001) *Indonesia: laporan pembangunan manusia 2001 menuju konsensus baru : demokrasi dan pembangunan manusia indonesai*. Jakarta, BPS, BAPPENAS dan UNDP.
- Jhingan, M. L. (2003). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Jr Tsung, *The Inequality Of Regional Economic Development In China Between 1991-2001. Vol 1 No 3, September Pp273-285: Journal Of Chinnese Economic And Business And Businnes Studies*.
- Kuncoro, M. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2012). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Erlangga: Jakarta
- Mardiana. (2012). desentralisasi fiskal dan disparitas regional di provinsi riau. *jurnal ekonomi*, 20.
- Setiawan. (2010). *Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Badouse. Padang.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekarno (2011) *analisis dampak dana alokasi umum terhadap ketimpangan pembangunan 2004-2009*, bogor, IPB
- Statistik, B. P. (N.D.). *Sumatera Barat Dalam Angka 2010*. Jakarta: Bps.
- Sumarsono, Sonny. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suparmoko, M. (2001). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Syahrial. (2015). Disparitas regional Provinsi Sumatera Barat Di Era Otonomi Daerah. *Tata Loka*, 53-63.
- Todaro (2006) *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta. Erlangga
- Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. CV, Eko Jaya